

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DESA MAUR BARU KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Irwanto

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Musi Rawas

E-mail: irwanto@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the village government's policy in developing the economic potential of Maur Baru Village. The problem in this study focuses on the policy of developing village economic potential that has economic value to be developed in 2020. Qualitative descriptive research method, research data collection by carrying out observations, interviews, and documentation. The research focus is on the policy of developing the village's economic potential from the aspect of problem identification, the existence of goals, and the existence of a plan. The data analysis technique used the Miles and Huberman Model interactive model with the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the policy of developing the village's economic potential from the aspect of problem identification, the existence of goals, the existence of a plan was not stipulated in the Village Regulation so that it had not been of value for the welfare of the community. Identification of problems in developing the village's economic potential has not been carried out properly, exploring the economic potential by establishing a culinary tourism program. The village government's desire to develop the village's economic potential, clearing peat land, rice fields, fish ponds, and fish farming has failed. The existence of a village economic potential development plan is constrained by human resources, internal and external cooperation.

Keywords: Policy Implementation; Village Economic Potential.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah Desa dalam pengembangan potensi ekonomi Desa Maur Baru. Masalah pada penelitian ini fokus pada kebijakan pengembangan potensi ekonomi desa yang memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan tahun 2020. Metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data penelitian dengan melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian pada kebijakan pengembangan potensi ekonomi desa dari aspek identifikasi masalah, adanya tujuan, dan adanya rencana. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Model Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan potensi ekonomi desa dari aspek identifikasi masalah, adanya tujuan, adanya rencana tidak ditetapkan dalam Peraturan Desa sehingga belum dinilai guna kesejahteraan masyarakat. Identifikasi masalah pengembangan potensi ekonomi desa belum dilaksanakan dengan baik, menggali potensi ekonomi dengan membentuk program wisata kuliner. Adanya keinginan pemerintah desa dalam pengembangan potensi ekonomi desa pembukaan lahan gambut, sawah, kolam ikan, ternak ikan mengalami kegagalan. Adanya rencana pengembangan potensi ekonomi desa terkendala sumberdaya manusia, kerjasama internal dan eksternal.

Kata kunci: Pelaksanaan Kebijakan, Potensi Ekonomi Desa.

PENDAHULUAN

Setiap desa memiliki potensi ekonomi dan beragam sumber daya alam (SDA) yang melimpah menjadi suatu hal yang bernilai. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penghambat menggali potensi ekonomi daerah setempat. Penting diperhatikan pemerintah pusat untuk mendukung mengembangkan pemerataan pembangunan. Potensi yang dimiliki daerah sehingga memiliki nilai tambah.

Pemerataan pembangunan yaitu bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan “kesejahteraan umum” (UUD 1945 alenia ke 4). Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan yang merata. Pembangunan dimaksudkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yakni tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Pencapaian pelaksanaan pembangunan yang diharapkan tersebut tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal lahirnya otonomi daerah di Indonesia termasuk adanya desentralisasi fiskal. Adanya otonomi daerah mampu mendorong kegairahan daerah untuk mengembangkan perekonomiannya.

Pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda

pula. Maka, kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya agar mampu mencapai hasil pembangunan yang optimal.

Hasil penelitian pemberdayaan masyarakat Desa digunakan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Desa agar pemerataan ekonomi dapat terwujud dan menciptakan kemandirian Desa. Pentingnya kebijakan pemerintah desa untuk menggali potensi yang dimiliki desa, kebijakan yang dimaksud yakni pemanfaatan sumber daya agar tercapainya pemerataan pembangunan di desa. Berdasarkan hasil penelitian, desa didorong untuk mampu mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat serta diperlukan model inovatif. Pengembangan potensi desa dengan melihat sumber daya yang dimiliki desa diperlukan sebuah inovasi.

Tujuan dalam mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta memajukan Perekonomian Masyarakat Desa.

Hasil penelitian, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dana desa dalam pengelolaan potensi desa adalah kualitas dan kuantitas SDM perangkat desa, kerjasama antar perangkat desa, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pengguna layanan. Faktor SDM menjadi penghambat pengembangan potensi desa samapai dengan kebijakan pengembangan yang seharusnya diambil oleh Kepala Desa dari melihat sumber daya yang dimiliki desa.

Hasil penelitian, terdapat penghambat implementasi kebijakan

dana desa dalam pengelolaan potensi Desa yaitu kualitas dan kuantitas SDM perangkat desa, kerjasama antar perangkat desa, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah Desa membuat kebijakan baru mengenai pelatihan agar dapat SDM lebih unggul dalam pengelolaan memaksimalkan potensi desa Maur Baru.

Selanjutnya, hasil penelitian bahwa pengembangan potensi desa secara ideal berupa Lumbung Ekonomi Desa sebagai model inovatif. Mengingat bahwa Desa Maur Baru mempunyai potensi ekonomi yang besar seperti karet, sawit, sawah. Namun masih mengalami kesulitan dalam memaksimalkan pengelolaan potensi alam seperti pengolahan lahan tidur yang masih belum digunakan secara maksimal. Pentingnya melakukan penelitian ilmiah skripsi dengan judul “**Analisis Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Maur Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi ekonomi Desa Maur Baru?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini fokus pada kebijakan pengembangan potensi ekonomi Desa Maur Baru, potensi desa yang memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan tahun 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan pemerintah

Desa dalam pengembangan potensi ekonomi Desa Maur Baru.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini memberikan masukan pengembang ilmu pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Musi Rawas. Penelitian ini dapat memberikan masukan pengembangan ilmu kebijakan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan kontribusi dan masukan kebijakan pengembangan Desa, sebagai berikut :

- a. Kepala Desa, membuat kebijakan dalam pengembangan potensi desa melalui penetapan Peraturan Desa.
- b. BPD, sebagai masukan untuk perumusan kebijakan pengembangan potensi desa.
- c. Masyarakat Desa, sebagai masukan untuk perumusan agar masyarakat desa memiliki kepedulian dan pengembangan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan. Kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti selalu menggunakan akal budidaya, pandai, mahir.

Pengertian di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut, kemudian pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan.

Mengambil sebuah kebijakan maka diperlukan tahap-tahap pengambilan kebijakan tersebut. Tahap-tahap pengambilan kebijakan ini merupakan prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Prinsip dasar dari permasalahan kebijakan ini merupakan sebuah proses analisa kebijakan yang akan diterapkan. Analisa kebijakan ini pada dasarnya merupakan proses kognitif, sementara pembuatan kebijaksanaan bersifat politis.

Pengambilan kebijakan dengan melakukan identifikasi masalah, mencari masalah yang dihadapi, kemudian digolongkan menurut jenisnya. Proses pengidentifikasian masalah ini merupakan langkah awal yang sangat penting akan menentukan langkah

berikutnya. Kemudian masalah diklasifikasikan menurut sebab, sumber, jenis, dan bidang. Identifikasi masalah harus dilengkapi dengan data dan fakta yang ada dilapangan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi pertanian adalah terjadinya konversi lahan subur yang cenderung semakin cepat. Beberapa lokasi telah terjadi konversi lahan dan pemanfaatan lahan di lokasi lainnya ternyata masih belum optimal. Data statistik menunjukkan bahwa hingga tahun 2011 masih terdapat 0,7 juta Ha lahan sawah dan lahan kering yang belum diusahakan secara optimal dan terlantar atau yang sering disebut dengan lahan tidur.

Lahan tidur adalah lahan pertanian yang sudah tidak digunakan selama lebih dari dua tahun. Lahan tidur umumnya merupakan sebuah bagian dari sistem peladangan berpindah di mana petani membuka hutan, menanamnya selama beberapa musim tanam, dan meninggalkannya untuk membuka lahan baru. Lahan tidur sering kali berupa lahan yang kritis dan miskin nutrisi sehingga sulit untuk ditanami tanaman penghasil pangan maupun tanaman pertanian lain yang cepat menghasilkan. Penyebab terbentuknya lahan tidur bisa dilihat secara fisik dan sosial.

Ketika suatu lahan tidak lagi mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal, biasanya lahan ditinggalkan. Hal ini umum terjadi pada sistem ladang berpindah. Sistem ladang berpindah diketahui sebagai penyebab terjadinya degradasi lahan yang dapat menuju ke desertifikasi. Selain faktor kondisi tanah, faktor sosial ekonomi juga menentukan. Petani yang tidak lagi menganggap pertanian sebagai sebuah

mata pencaharian yang menguntungkan akan beralih dan meninggalkan lahannya. Perbaikan pola tanam dengan diversifikasi komoditas dan rotasi tanaman dapat memperkaya jenis sumber penghasilan petani sehingga petani mendapatkan penghasilan alternatif di luar tanaman utama.

Membuat dan menerapkan suatu kebijakan, adanya tujuan yakni adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai, melalui usaha yang telah di sepakati dengan bantuan faktor pendukung yang ada atau yang diperlukan. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik.

Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan dicapai (diatur) di mana sasarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.

Selanjutnya dikatakan pula, bahwa tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat yang ada di daerah. Mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal untuk membangun daerah demi

menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi daerah mengarah kepada perkembangan ekonomi pada desa. Ada dua kebijakan yang nantinya akan dihasilkan: *pertama*, kebijakan mendukung efektifitas penggunaan dana desa, sementara yang *kedua*, kebijakan terkait permasalahan logistik.

Mendukung efektifitas penggunaan dana desa, pemerintah menyorot dua hal yaitu memperlancar dan mempercepat penyaluran dana desa serta mendorong penggunaan dana desa melalui mekanisme insentif. Insentif akan diberikan agar pembangunan infrastruktur desa yang memanfaatkan alokasi dana desa dapat ditingkatkan. Untuk mempercepat penyalurannya, pemerintah juga sedang merancang payung hukum berupa regulasi yang memperbolehkan dana desa dapat disalurkan langsung ke kas pemerintah desa, tidak perlu melalui kas pemerintah kabupaten atau kota terlebih dahulu.

Tujuannya jelas untuk memotong rantai birokrasi, optimalisasi pemanfaatan dana desa menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung kesuksesan APBN tahun 2016, yang dianggap menjadi *milestone* penganggaran pertama kalinya bagi pemerintahan baru di era Presiden Jokowi-JK. APBN 2016 sendiri disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.

Membuat dan menerapkan suatu kebijakan penting memperhatikan adanya rencana yang tersusun, adanya rencana yang merupakan alat atau cara tertentu

untuk mencapainya. Adanya program, yaitu cara yang telah disepakati dan mendapat persetujuan serta pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya, sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah atau daerah

Berdasarkan sisi besaran anggaran belanja khususnya transfer ke daerah dan dana desa, untuk pertama kalinya alokasi lebih besar dari belanja. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen nyata dari pemerintah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal seutuhnya. Penyumbang persentase kenaikan terbesar dalam transfer ke daerah dan dana desa adalah alokasi anggaran untuk transfer khusus dan dana desa, antara lain dengan dialokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur publik daerah, realokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan ke DAK, dan pemenuhan *roadmap* dana desa yang dalam tahun 2016 dialokasikan paling sedikit 6%.

Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Potensi desa sendiri terbagi menjadi 2 yakni potensi fisik dan potensi nonfisik. Potensi fisik terdiri dari tanah, merupakan faktor yang penting bagi penghidupan dari warga desa, kemudianair digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari hari, manusia dalam hal ini diartikan sebagai tenaga kerja ada pula

cuaca serta iklim, memiliki peran penting bagi warga desa.

Sedangkan potensi non fisik yaitu masyarakat desa yang hidup secara bergotong royong menjadi kekuatan produksi serta pembangunan desa, aparatur desa atau pamong desa yang bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban serta kelancaran pemerintahan desa, lembaga sosial desa menjadi pendorong partisipasi warga desa dalam kegiatan pembangunan desa secara aktif.

Desa Maur Baru memiliki potensi yaitu karet dan sawit, dan juga terdapat lahan tidur kurang lebih 300 hektar yang perlu mendapatkan pengembangan irigasi agar dapat berjalan dengan baik lagi.

Tujuan dari usaha pengembangan ekonomi tidak hanya merupakan program dari pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah sedangkan pengertian pembangunan ekonomi dalam lingkup daerah yaitu suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dengan menjalin pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi belum tentu dapat mengatasi permasalahan yang ada pada suatu wilayah tersebut. Seperti yang dijelaskan Kuncoro (2016) yang relevan dengan kondisi di daerah bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan syarat (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan. Bahkan Arsyad (2015) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam

memecahkan masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi yang timpang.

Proses pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya tidak lagi hanya memfokuskan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melainkan kualitas dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kualitas pertumbuhan ekonomi daerah itu terkait dengan berkurangnya tingkat kesenjangan antara daerah ekonomi maju dengan daerah yang lemah. Ketidakmerataan tersebut disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang dimiliki satu daerah dengan daerah lainnya (Gini Rasio).

Upaya pemerintah dalam pengembangan potensi daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembangunan pada dasarnya adalah kunci keberhasilan pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing daerah. Pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), komponen sumber daya manusia, teknologi dan sistem.

Teori pertumbuhan jalur cepat (*Turnpike*) diperkenalkan oleh Samuelson (2016) bahwa setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karenasektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan (Tarigan, 2015).

Mensinergikan sektor adalah membuat semua sektor saling terkait dan saling mendukung. Pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan yang lain, begitu juga sebaliknya.

Menggabungkan kebijakan jalur cepat (*turnpike*) dan mensinergikan dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat. sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan tingkat urgensi masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada kebijakan pengembangan potensi ekonomi desa yang objek utamanya desa Maur Baru dilihat dari aspek identifikasi masalah, adanya tujuan, dan adanya rencana.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif, pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan memberikan deskripsi secara sistematis mengenai data, sifat-sifat, dan hubungan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur dalam penelitian yang menekankan pada kualitas penelitian yang mengacu pada teori dan konsep. Metode deskriptif kualitatif ini di gunakan karena data penelitian berupa kata bukan berupa angka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan pengembangan potensi ekonomi desa Maur Baru.

Data primer merupakan data yang di peroleh dari observasi langsung dari peneliti dapat juga berupa hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan di Desa Maur Baru yaitu Kepala Desa Maur Baru dan beberapa warga desa dan hasil observasi lapangan secara sistematis serta terus menerus di lokasi penelitian.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari karya ilmiah, literatur, jurnal dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini serta situs di Internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini juga nantinya akan mendukung data primer yaitu hasil wawancara dengan beberapa informan yang ada di Desa Maur Baru.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Pengumpulan data benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan cara menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang cocok digunakan dalam pengumpulan data ini, yakni :

1. Observasi
2. Wawancara Mendalam
3. Dokumentasi
4. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat uraian dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Penyusunan pembahasan menggunakan teknik analisis dan deskriptif, data tersebut didapatkan dari teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun studi pustaka.

Data yang sudah dianalisis dengan menggunakan kata-kata dan kalimat untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengembangan potensi ekonomi desa Maur Baru.

Pembuktian validitas data ditentukan oleh kredibilitas temuan dan

interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian.

Penelitian kualitatif, triangulasi data memiliki posisi penting untuk mengukur kredibilitas data dan meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data yaitu menggunakan sumber lebih dari satu/ganda, yaitu Kepala Desa Maur Baru dan perangkat desa setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah pembentukan desa Maur Baru yang berasal dari cerita rakyat bahwa suatu hari nenek moyang mandi di sungai Rupit, hayutlah bunga mawar kemudian diambil yang menjadi inspirasi terbentuknya desa Mawar yang seiring waktu beruba menjadi Desa Maur. Selanjutnya pemekaran desa Maur Lama pada tahun 1940 yang dipimpin Pesirah membetuk desa Maur Baru yang mayoritas penduduknya berasal dari desa Maur Lama.

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan. Hasil penelitian merupakan hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi yang didapat dari lokasi penelitian. Sedangkan pembahasan menguraikan hasil penelitian, teori, peraturan, penelitian terdahulu yang selanjutnya peneliti membuat uraian penjelasan.

Penelitian kualitatif sebagai instrumen penelitian adalah peneliti, peneliti melaksanakan kegiatan wawancara kepada informan penelitian. Adapun wawancara telah dilakukan kepada informan kunci dan informan pendukung, sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jenis Informan
1	Adi Karel Kareli	Kepala Desa	Informan Kunci
2	Taufikkurohim	Sekretaris Desa	Informan
3	Abu Hubaidah	Kasi Perlengkapan	
4	Abu Nirzam	Tokoh Masyarakat	
5	Densi Irawan	Ketua BPD	
6	Ashari	Tokoh Adat	
7	Hasbulah	Ketua Kelompok	

Masalah yang dihadapi desa dalam pengembangan potensi ekonomi pada Lahan Sawah Danau Darat Loksai Dusun 1, 2, dan 4, kondisi lahan terlantar hanya menjadi lokasi gembala Kerbau penduduk.

Selanjutnya, masalah yang dihadapi desa dalam pengembangan potensi ekonomi, hasil wawancara kepada Kepala Desa Maur menjelaskan:

“Masalah perkembangan ekonomi desa bidang pertanian masyarakat secara umumnya keinginan instan langsung menghasilkan serta kesulitan lahan tidur tidak termanfaatkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, redahnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi bidang pertanian sehingga menjadi kesulitan pengembangan lahan tidur. Lemahnya SDM masyarakat, ketergantungan masyarakat bertani karet, penggarap lahan. Pemilik lahan Sawah tidak melakukan aktifitas pertanian atau menjual lahan Sawah kepada pemerintah.

Pendapat yang sama dikemukakan Tokoh Masyarakat menegaskan bahwa “persoalan sektor ekonomi desa, masyarakat desa harus ada kerjasama dengan pemerintah desa”. Hasil wawancara kepada Ketua Adat A menjelaskan bahwa: “Kebun karet tidak disadap dan sawah tidak diolah”.

Observasi Sawah Bung Pulai Lokasi Dusun 2 keadaan lokasi sawah terbenkakai, potensi yang di miliki desa untuk di kembangkan, terlihat Tenak Kerbau. Proses identifikasi masalah yang dihadapi dalam menggali potensi ekonomi yang ada di desa. Kepala Desa menjelaskan: “terkendala SDM, masyarakat malas untuk mengembangkan karena turunnya harga hasil pertanian karet dan sawit”.

Selanjutnya, Tokoh Masyarakat menjelaskan: Pemerintah desa terhadap masyarakat, tokoh adat harus ada pertemuan untuk menyikapi potensi ekonomi”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, hasil Musrenbangdes dilaksanakan tahun 2020 pengembangan UKM Kuliner Wahana Wisata yang menjadi solusi pengembangan potensi ekonomi desa harus mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak secara berkelanjutan. Penjelasan Tokoh Masyarakat bahwa “harus melakukan tindakan semacam menentukan sikap saling mendukung kegiatan pengalihan potensi ekonomi”

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik simpulan sementara bahwa belum terjalannya kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan potensi desa. Faktor penghambat kerjasama yaitu kualitas SDM perangkat desa, belum terjalannya kerjasama yang baik antar perangkat desa serta masyarakat desa. Kondisi sosial ekonomi

masyarakat juga menjadi faktor penghambat menjalin kerjasama dengan pihak lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan simpulan bahwa kebijakan pengembangan potensi ekonomi desa dari aspek identifikasi masalah, adanya tujuan, adanya rencana tidak ditetapkan dalam Peraturan Desa sehingga belum dinilai guna kesejahteraan masyarakat.

Aspek identifikasi masalah terdapat masalah yang dihadapi desa dalam pengembangan potensi ekonomi sektor pertanian sawah dan lahan gambut yaitu banyaknya ternak kerbau yang dipelihara secara liar. Proses identifikasi masalah untuk mengembangkan potensi ekonomi desa belum dilaksanakan dengan baik berakibat kegagalan pengembangan kolam ikan galian atau bioplopp tidak adanya bimbingan tenaga ahli. Pemerintah desa telah berupaya menggali potensi ekonomi dengan membentuk program pembedayaan masyarakat yaitu wisata kuliner untuk menciptakan kemandirian desa.

Aspek adanya rencana penyusunan potensi ekonomi desa dengan melibatkan masyarakat desa, belum terjalinnya kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan potensi desa. Faktor penghambat kerjasama yaitu kualitas SDM perangkat desa, belum terjalinnya kerjasama yang baik antar perangkat desa serta masyarakat desa. Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penghambat menjalin kerjasama dengan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S.Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwa
- Arsyad, A. (2015). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Budiharjo, M. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dana, P.M dan I Nyoman Suprpta. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa di Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP* 11(2). Available online at Available online at <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/viewFile/282/279>
- Dunn, William N. (1999). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya
- Faisal, S. (2001). *Format-format penelitian sosial : dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gulo, W. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muktiyanto, Ali (2014) *Analisis Kasus Bisnis*. In: Konsep Dasar Keuangan, Laporan, dan Analisis Keuangan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.

- Samuelson, Larry. 2016. "Game Theory in Economics and Beyond." *Journal of Economic Perspectives*, 30 (4): 107-30. DOI: 10.1257/jep.30.4.107
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarigan, R. (2007). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Whitney E, Rofles SR, penyunting. (2008). *Understanding Nutrition*. 11th ed. United States: Thomson Wadsworth.
- Yunas, NS. (2018). Implementasi Konsep *Penta Helix* Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Inovasi Kebijakan*. 3(1): 37-46. DOI:10.21787/mp.3.1.2019.37-46
- Zainudin, A dan Sri Sutjiatmi. (2018). Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar). *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*. 3(1):1-14. Available online at: <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/jip>